

**PENGARUH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KEUANGAN
TERHADAP TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH**

**THE INFLUENCE OF FINANCIAL MANAGEMENT POLICY
AND FINANCIAL IMPLEMENTATION PERFORMANCE ON
ORDERLY REGIONAL FINANCIAL ADMINISTRATION**

Asha Jindana

Universitas Muhammadiyah Sukabumi
aisyahjindan91@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and explain the influence of regional financial management policies and the performance of concurrent financial administration on the orderly administration of regional finances at the Regional Secretariat of Sukabumi City. The variables used in this study are regional financial management policies (X1) and financial management performance (X2), as well as the orderly administration of regional finances (Y). This study uses a quantitative method with an associative approach.

The population in this study were 316 employees of the Regional Secretariat of Sukabumi City, while the sampling technique used the Taro Yamane formula with an error rate of 11%. Primary data collection was carried out through questionnaires. The analysis technique used starts from the validity and reliability test, normality test, classic assumption test, multiple linear regression test and hypothesis testing.

The results of the study show that partially or separately each variable, namely regional financial management policies and financial management performance, has an influence on the orderly administration of regional finances. Simultaneous test results also show that jointly the regional financial management policy variables and financial management performance have an influence on the orderly administration of regional finances with an F test value of 12.893 greater than the F table value of 3.14 ($12.893 > 3.14$) with a coefficient value determination or R square value of 0.591 or 59.1%.

Keywords: Financial management policy, performance of financial administration and orderly regional financial administration

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara harus dapat memenuhi fungsinya dalam melaksanakan program pembangunan secara terencana dikaitkan dengan perencanaan pembangunan nasional (Kamasan et al., 2019). Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mendapatkan jaminan pelaksanaan kegiatan dan penyediaan pembiayaan dalam anggaran belanja mencerminkan rencana keuangan tahunan (Raharja et al., 2015). Pelaksanaan pembiayaan daerah sebagai dasar penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah (Mbipi et al., 2021).

Proses pelaksanaan pembiayaan daerah terjadi transaksi dan penatausahaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting sekali karena proses tersebut memiliki peran penting aparatur pemerintah daerah yang profesional, kreatif, inovatif dan akuntabel dalam mewujudkan tertib administrasi yang mampu menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan daerah (Sultan, 2014).

Untuk itu pemerintah Kota Sukabumi membuat peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang disebut dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 107 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang gunanya untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Sukabumi sehingga pengelolaan keuangan di Kota Sukabumi sesuai dengan aturan yang diterapkan sehingga administrasi keuangan di Kota Sukabumi lebih baik lagi (Sukabumi, 2007).

Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 107 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjelaskan bahwa Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (Sukabumi, 2007). Setelah terbentuknya BUD diharapkan proses penyelesaian pencairan dana bisa lebih tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan tetapi pada kenyataannya proses penyelesaian penatausahaan terkesan lambat. Kenyataan ini harus diakui untuk perbaikan di masa yang akan datang sebagai aparatur yang bertugas penatausahaan masih mendapatkan berbagai kendala/kesulitan sehingga berdampak kepada kualitas pelayanan dalam pelayanan prima.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan dengan baik, maka kebijakan Wali Kota tersebut harus diimplementasikan dengan seksama, maka untuk mengukur baik buruknya implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kota Sukabumi dapat dilihat dari beberapa dimensi antara lain komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi (Surjono & Firdaus, 2019).

Dua karakter yang menonjol dari birokrasi adalah prosedur pelaksanaan baku dan fragmentasi (Khusaini, 2018). Pengembangan ini dilakukan untuk membatasi waktu dan sumber daya para pelaksana dan keinginan akan keseragaman pelaksanaan dalam organisasi yang kompleks dan menyebar luas. Namun dalam masa selanjutnya, seringkali prosedur pelaksanaan

baku dan fragmentasi menghabiskan sumber daya, tindakan yang tidak diinginkan, merintang koordinasi dan membingungkan pelaksana. Struktur birokrasi memang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena dengan struktur yang baik maka pelaksanaan kebijakan akan lebih baik lagi (Khusaini,2018).

Idealnya memang semua dimensi yang telah dijelaskan di atas dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan konsisten namun kenyataan dilapangan masih banyak kendala contohnya ada beberapa implementasidilapangan yang dirasakan rancu atau kurang tepat, seperti dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi No.107 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Bab II

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Sub Bagian (Kasubag) pada Sekretariat Daerah (Setda) adalah selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), tetapi pada pelaksanaannya jabatan ini dipegang oleh Kepala Bagian (Kabag) pada lingkungan Setda. Hal ini mengindikasikan adanya kerancuan dalam mengimplementasikan Kebijakan Wali Kota. Selain itu kebijakan tersebut sepertinya kurang dikomunikasikan dengan baik, sumberdaya aparturnya masih kurang, sikap para aparatur yang melaksanakannya kurang mempunyai kesadaran Apabila ini dibiarkan terus menerus mungkin administrasinya juga akan kacau,tidak jelas siapa yang mempunyai tanggungjawab dan wewenang, adanya tumpang tindih pekerjaan. Yang pada akhirnya apa yang diharapkan dari kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan tidak dapat tercapai.

Penelitian yang telah penulis laksanakan hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh N. Darma yang berjudul: Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Darma, 2019). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, penulis meneliti di kantor sekretariat kota Sukabumi, sedangkan N. Darma meneliti di Pemerinah Provinsi Sumatera Utara, dalam fokus penelitiannya juga terdapat perbedaan, peneliti fokus terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah, kinerja penyelenggaraan keuangan daerah dan tertib administrasi. Sedangkan N. Darma fokus terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Sehingga tujuan dari penelitiannya juga terdapat perbedaan.

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha1=1= Terdapat pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah terhadap tertib administrasi keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.

Ho1=Tid= Tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah terhadap tertib administrasi keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.

Ha2=Ter= Terdapat pengaruh kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan terhadap tertib administrasi keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.

Ho2=Ti= Tidak terdapat pengaruh kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan terhadap tertib administrasi keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.

Ha3=Te= Terdapat pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja

penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan secara bersamaan terhadap tertib administrasi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.

Ho3=3 = Tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan secara bersamaan terhadap tertib administrasi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.

Dari hipotesis diatas dapat dijabarkan apabila implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik, maka tertib administrasi keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi akan baik, karena ini saling berhubungan. Selain itu apabila kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan juga baik maka tertib administrasi keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi juga akan baik. Begitu juga apabila implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan secara bersamaan dilaksanakan dengan baik maka tertib administrasi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Sukabumi juga akan optimal.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan antara variabel yang diteliti sehingga penulis dapat menarik kesimpulan.

Sugiyono menjelaskan definisi metode kuantitatif (Sugiyono, 2017) yaitu:

“Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.”

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data.

Adapun jenis penelitian dalam pengumpulan data ini yaitu menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data sekunder di dalam penelitian ini yaitu buku-buku, laporan-laporan yang menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari Kantor Setda Sukabumi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan rancangan untuk menganalisis data yang telah diperoleh atau dikumpulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda dan Uji Hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Berikut ini akan digambarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan SPSS versi 26.0 ke dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Uji Normalitas Variabel X1-Y
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual	
N	65
Normal Parameters,a,b Std.Deviation	Mean 4.20992991 .0000000
Most Extreme Differences Positive Negative .068	Absolute .106 .106 -
Test Statistic	.106
Asymp.Sig.(2-tailed)	.069°

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui nilai signifikansi variabel X1-Y sebesar 0,69 lebih besar dari 0,05 maka data variabel X1-Y berdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Normalitas Variabel X2-Y
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

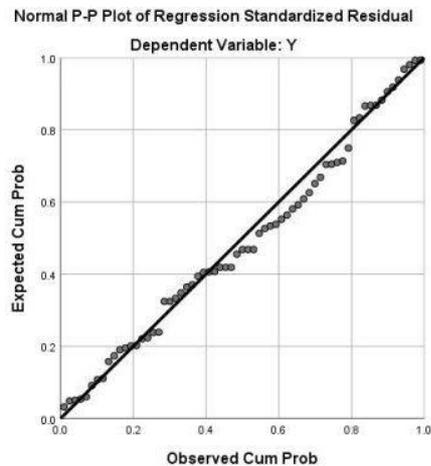
Unstandardized Residual	
N	65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean
	.0000000
Most Extreme Differences	Std.Deviation
	4.04836920
	Absolute
	.112
	Positive
	.112
	Negative
	.059
Test Statistic	.112
Asymp.Sig.(2-tailed)	.041

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS 26,2023

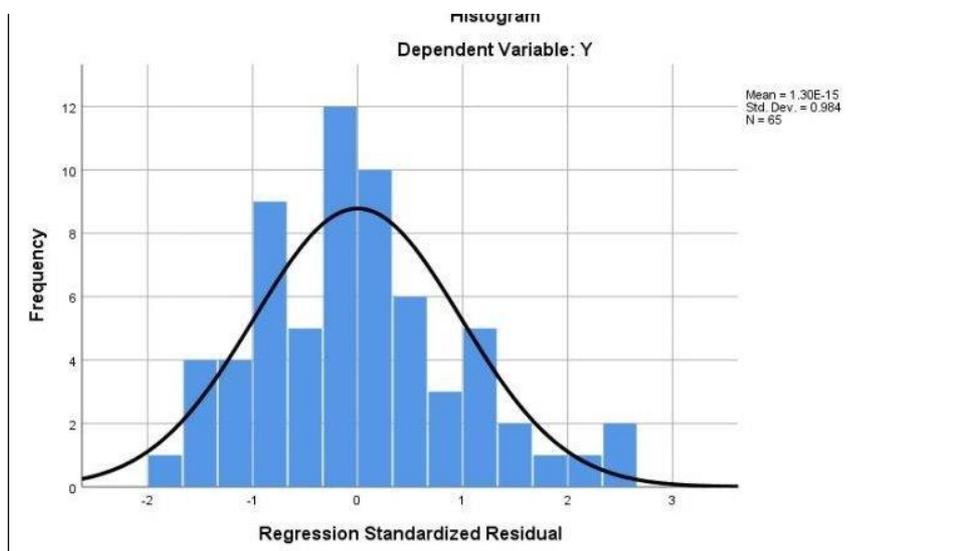
Berdasarkan tabel 4.5 diketahui nilai signifikansi variabel X2-Y sebesar 0,41 lebih besar dari 0,05 maka data variabel X2-Y berdistribusi normal.

Selain dengan menggunakan uji one sample K-S, pengujian untuk melihat tingkat normalitas suatu variabel dapat juga dengan menggunakan grafik P-P Plot dan histogram.



Gambar 1. Grafik P-P Plot

Dari grafik P-P Plot diatas dapat dilihat bahwa penyebaran data telah normal, hal ini dikarenakan penyebaran data telah mengikuti arah garis diagonal sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa uji normalitas dengan menggunakan grafik P-P Plot telah normal.



Gambar 2. Grafik Histogram

Dari gambar grafik histogram diatas dapat dilihat bahwa data telah terdistribusi dengan membentuk kurva berbentuk lonceng yang tidak condong (skewness) ke kiri maupun ke kanan sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Berikut adalah hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan uji torelance dan VIP dengan menggunakan software SPSS 26.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Unstandardized Model B Std. Error Coefficients	Coefficient Beta	Standardized Coefficients	t	Collinearity Statistics	
				Sig. Tolerance	VIF
1 (Constant) 30.428 4.854			6.268	.000	
X1 .184	.078	.281	2.365	.021	.743 1.347
X2 .322	.097	.396	3.331	.001	.743 1.347
a. Dependent Variabel: Y					

Berdasarkan tabel 3 diketahui nilai tolerance variabel X1=0,743 dan X2= 0,743 lebih

X1=0,743 dan X2=0,743

besar dari 0,10. Sementara itu nilai VIF variabel X1=1,347 dan X2=1,347 lebih kecil dari 10,00.

Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

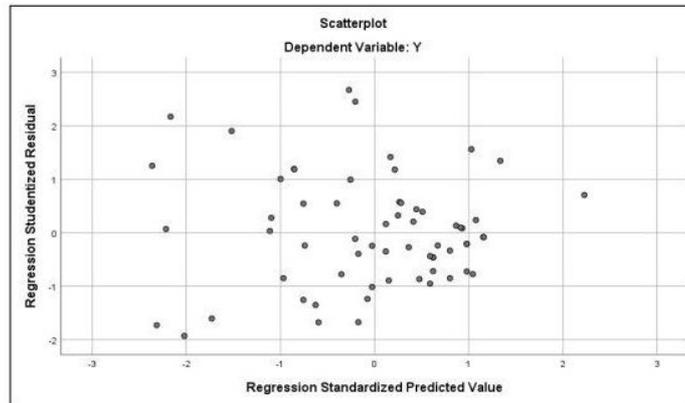
Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ketidaksamaan varians dalam model regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka dapat dikatakan terjadi homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang terjadi homoskedastisitas bukan heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot dengan menggunakan ZPRED dan SREDIS yang terdapat dalam software SPSS 26 dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila terlihat suatu pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk gambar gelombang atau pola lainnya, maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Apabila tidak terlihat suatu pola tertentu tetapi titik-titik yang menyebar diatas dan bawah angka 0 (nol) pada garis sumbu Y maka dapat diindikasikan bahwa telah terjadi homoskedastisitas.



Gambar 3. Grafik Scatterplot

Grafik scatterplot diatas menggambarkan pola yang menyebar baik diatas ataupun dibawah angka 0 (nol) sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini sebaran data terjadi secara homokedastisitas.

4.2.3. Uji Regresi Linier Berganda

Model regresi pada penelitian ini adalah menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda adalah model regresi yang mana model regresinya dengan variabel lebih dari dua variabel atau lebih. Uji regresi linier ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y).

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Mode	Unstandardize B	Coefficientd Coefficients Std. Error	sa Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	30.428	4.854		6.268	.000
X2	.184	.078	.281	2.365	.021
	.322	.097	.396	3.331	.001
a. Dependent Variabel	:Y				

Dari tabel coefficients diatas dapat diketahui persamaan model regresi berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = b + bX_1 + bX_2 + e$$

$$Y = 30,428 + 0,184X_1 + 0,322X_2 + e$$

Keterangan :

a = nilai konstan

= Varibale X1

X2 = Variabel X2

=Variabel Y

e =nilai error

persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 30,428 mempunyai arti, apabila nilai X1 dan X2 diberi nilai 0 (nol),maka Y mempunyai nilai sebesar 30,428.
- b. Nilai koefisien Variabel X1 (b1) sebesar 0,184 mempunyai arti, apabila variabel X1 ditingkatkan 1 derajat, maka variabel Y akan naik sebesar 0,184.
- c. Nilai koefisien Variabel X2 (b2) sebesar 0,322 mempunyai arti,apabila Variabel X2 ditingkatkan 1 derajat, maka variabel Y akan naik sebesar 0,322.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t atau uji secara partial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent serta untuk mengukur sejauh mana pengaruh yang diberikan. Uji t ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hasil perhitungan (thitung) dengan nilai t standar yang telah ditetapkan (ttabel) dengan cara menggunakan software Microsoft Excel dengan rumus =TNIV (profitabilitas;df) dimana nilai profitabilitas adalah sebesar 5% (0,05) dan nilai df adalah jumlah sample dikurangi 2,yaitu 65-2=63. Sehingga nilai ttabel yang diperoleh adalah =TNIV (0,05;63)menghasilkan nilai 1,999.

Adapun ketentuan dalam melihat besarnya pengaruh antar variabel dalam uji t ini adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel ($thitung > ttabel$) maka hipotesis awal (H_0) ditolak dan hipotesis baru (H_1) diterima.
- b. Apabila nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel ($thitung < ttabel$) maka hipotesis awal (H_0) diterima dan hipotesis baru (H_1) ditolak.

Hipotesis awal (H_0) adalah asumsi bahwa setiap variabel yang diujikan tidak mempunyai hubungan dan pengaruh sama sekali, sedangkan hipotesis baru (H_1) berasumsi bahwa variabel yang diujikan mempunyai hubungan.

Tabel 5. Hasil Uji t

No	Hipotesis	Nilai ttabel	Nilai thitung	Kesimpulan
1	(X1)→(Y)	1,999	2,365	H0=ditolak H1= diterima
2	(X2)→(Y)	1,999	3,331	H0=ditolak H1 =diterima

Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS 26,2020

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh terhadap tertib administrasi keuangan daerah. Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai thitung yang diperoleh sebesar 2,365 lebih besar daripada nilai ttable sebesar 1,999 ($2,365 > 1,999$) dengan nilai siginifikansi sebesar 0,021 dimana nilai tersebut lebih kecil dari pada nilai 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pengelolaan keuangan dengan tertib administrasi keuangan daerah.

Uji statitik untuk variabel kinerja penyelenggaraan keuangan menghasilkan nilai thitung sebesar 3,331 yang mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai ttable yaitu sebesar 1,999 ($3,331 > 1,999$) dengan nilai siginifikansi sebesar 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari pada nilai 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja penyelenggaraan keuangan dengan tertib administrasi keuangan daerah.

Uji F

Pengujhian hipotesis dengan menggunakan uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara keseluruhan. Uji F ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hasil perhitungan (Fhitung) dengan nilai F standar yang telah ditetapkan (Ftable).

Hasil dari F hitung antara variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Uji F Variavel X1 dan X2-Y

Model		Sum of Squares	ANOVAa df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	515.824	2	257.912	16.620	.000b
	Residual	962.115	62	15.518		
Total		1477.938	64			
a. Dependent Variabel: Y b.Predictors: (Constant)		, X2, X1				

Dari hasil tabel di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Dari tabel 4.9 anova (Uji F), nilai F sebesar 16,620 dengan signifikasi 0,000.

Pengambilan keputusan pertama dengan melihat nilai F perbandingan Fhitung dan Ftable dengan

taraf signifikansi 5% dan N 65, diperoleh Ftable adalah 3,14 dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, α , $df_1(k-1)$ atau $3-1 = 2$, dan $df_2 (n-k)$ atau $65-3 = 62$ (n jumlah

responden dan k adalah jumlah variabel). Dari tabel di atas diperoleh F hitung sebesar 16,620.

Hal ini menunjukkan $F_{hitung}(16,620) > F_{table}(3,14)$. Kedua, jika signifikansi $> 0,05$ ($0,05$) maka

Ho diterima dan Ha ditolak sedangkan apabila nilai signifikansi $< \alpha(0,05)$ maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka $,000 < 0,05$

Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X₁ (kebijakan pengelolaan keuangan) dan X₂ (kinerja penyelenggaraan keuangan) terhadap Y (tertib administrasi keuangan daerah) di Setda Kota Sukabumi.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi atau R² dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$).

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary			Std. Error of the Estimate
Model	R Square	Adjusted R	
1	.591 ^a	.349	3.939
a.		Predictors: (Constant), X ₂ , X ₁	

Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS 26, 2020

Tabel model summary di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi atau nilai R square sebesar 0,349 atau 34,9%. Nilai ini juga dapat diketahui dengan menggunakan rumus:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,5912 \times 100\%$$

$$Kd = 0,349 \times 100\%$$

$$Kd = 34,9\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh kebijakan pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan keuangan terhadap tertib administrasi keuangan daerah di Setda Sukabumi adalah sebesar 34,9% sedangkan sisanya sebesar 65,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel yang diteliti oleh peneliti.

Kebijakan pengelolaan keuangan Daerah Pada Setda Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil penelitian, dari 65 responden yang diberikan angket dapat diuraikan pernyataan mengenai variabel kebijakan pengelolaan keuangan, jawaban tertinggi didapat dari

responden yang menjawab Setuju mendapat tanggapan responden sejumlah 437(44,8%), sedangkan nilai terkecil diperoleh dari responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju dengan tanggapan sejumlah 12 (1,2%), sedangkan jawaban (sangat setuju) diperoleh dari tanggapan responden sejumlah 135 (13,8%), yang menjawab (netral) memperoleh tanggapan responden sejumlah 207 (21,2%) dan yang menjawab (tidak setuju) memperoleh tanggapan responden sejumlah 184(18,9%).

Berdasarkan garis kontinum di atas skor 3612 apabila dipersentasekan, menjadi $3612/4875 \times 100\% = 74,1\%$. Dilihat dari angka di atas berada pada interval jawaban 68,1% -84%, atau berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel kriteria berdasarkan persentase berikut ini.

Tabel 8. Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase

Interval Jawaban	Kriteria Penilaian
84,1%-100%	(Sangat baik)
68,1%-84%	(Baik)
52,1%-68%	(Cukup baik)
36,1%-52%	(Kurang baik)
20%-36%	(Tidak baik)

Berdasarkan hasil analisis di atas maka indikator pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan di SETDA Kota Sukabumi berada pada kategori baik berarti sudah optimal.

Kinerja Penyelenggaraan Keuangan Daerah pada SETDA Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil penelitian, dari 65 responden yang diberikan angket dapat diuraikan pernyataan mengenai variabel kinerja penyelenggaraan keuangan daerah, jawaban tertinggi didapat dari responden yang menjawab Setuju mendapat tanggapan responden sejumlah 498 (51,1%), sedangkan nilai terkecil diperoleh dari responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju dengan tanggapan sejumlah 6 (0,6%), sedangkan jawaban (sangat setuju) diperoleh dari tanggapan responden sejumlah 163 (16,7%), yang menjawab (netral) memperoleh tanggapan responden sejumlah 183 (18,8%) dan yang menjawab (tidak setuju) memperoleh tanggapan responden sejumlah 125 (12,8%).

Berdasarkan garis kontinum di atas skor 3612 apabila dipersentasekan, menjadi $3612/4875 \times 100\% = 74,1\%$. Dilihat dari angka di atas berada pada interval jawaban 68,1%-84%, atau berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel kriteria berdasarkan persentase berikut ini.

Tabel 9. Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase

Interval Jawaban	Kriteria Penilaian
------------------	--------------------

84,1%- 100%	(Sangat baik)
68,1%- 84%	(Baik)
52,1%- 68%	(Cukup baik)
36,1%- 52%	(Kurang baik)
20%- 36%	(Tidak baik)

Berdasarkan hasil analisis di atas maka variabel kinerja penyelenggaraan keuangan daerah di SETDA Kota Sukabumi berada pada kategori baik berarti sudah optimal.

Tertib Administrasi Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel di atas, dari 65 responden yang diberikan angket dapat diuraikan pernyataan mengenai variabel tertib administrasi keuangan daerah, jawaban tertinggi didapat dari responden yang menjawab Setuju mendapat tanggapan responden sejumlah 545(55,9%),

sedangkan nilai terkecil diperoleh dari responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju dengan tanggapan sejumlah 0 (0%), sedangkan jawaban (sangat setuju) diperoleh dari tanggapan responden sejumlah 173 (17,7%), yang menjawab (netral) memperoleh tanggapan responden sejumlah 213 (21,8%) dan yang menjawab (tidak setuju) memperoleh tanggapan responden sejumlah 44(4,5%).

Berdasarkan garis kontinum di atas skor 3772 apabila dipersentasekan, menjadi $3772/4875 \times 100\% = 77,4\%$. Dilihat dari angka di atas berada pada interval jawaban 68,1% -84%, atau berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel kriteria berdasarkan persentase berikut ini.

Tabel 10. Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase

Interval Jawaban	Kriteria Penilaian
84,1%-100%	(Sangat baik)
68,1%-84%	(Baik)(Cukup baik)(Kurang baik)(Tidak baik)
52,1%-68%	
36,1%-52%	
20%-36%	

Berdasarkan hasil analisis di atas maka variabel tertib administrasi keuangan daerah di SETDA Kota Sukabumi berada pada kategori baik berarti sudah optimal.

Pengaruh Kebijakan pengelolaan keuangan Terhadap Tertib administrasi keuangan daerah

Dari hasil analisis di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa model Summary, nilai $R^2=0,233$, artinya variabel bebas kebijakan pengelolaan keuangan daerah mampu menerangkan atau memprediksi nilai variabel terikat tertib administrasi keuangan daerah sebesar 23,3%. Sisanya sebesar 76,7% diterangkan oleh faktor-faktor lain diluar regresi. Berdasarkan output di atas juga diperoleh angka R sebesar 0,482. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara kebijakan pengelolaan keuangan daerah terhadap tertib administrasi keuangan daerah. Hubungan yang sedang ini disebabkan oleh kebijakan pengelolaan keuangan daerah cukup dominan untuk memperoleh tertib administrasi keuangan daerah yang baik, namun harus disertai dengan faktor lain agar diperoleh tertib administrasi keuangan daerah yang optimal.

b) Pengujian hipotesis alternatif (H_a) pertama diterima. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil dari thitung dengan ttabel. Dari tabel Coefficients di atas diperoleh nilai t hitung = 4,369. Sementara itu, untuk t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel = 1,999. Perbandingan antara keduanya menghasilkan: thitung > t tabel ($4,369 > 1,999$). Nilai signifikansi t untuk variabel X1 (kebijakan pengelolaan keuangan daerah) adalah 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0.05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dalam pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini berarti bahwa ada

pengaruh yang signifikan antara kebijakan pengelolaan keuangan daerah (X1) terhadap tertib administrasi keuangan daerah (Y) di Setda Kota Sukabumi.

c) Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: $Y=a+bX$

$$Y=41,373+0.316X$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa dari setiap penambahan 1 unit variabel bebas kebijakan pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan nilai variabel terikat tertib administrasi keuangan daerah sebesar 0,316.

Tabel 11. Acuan Interpretasi nilai 'r' Product Moment (Sugiyono, 2013)

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00-0.199	Sangat rendah/tidak ada hubungan
0.20-0.399	Rendah
0.40-0.599	Sedang
0.60-0.799	Kuat
0.80-1.00	Sangat kuat

Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Keuangan Terhadap Tertib administrasi keuangan daerah

Dari hasil analisis di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa model Summary, nilai $R^2=0,290$, artinya variabel bebas kinerja penyelenggaraan keuangan mampu menerangkan atau memprediksi nilai variabel terikat tertib administrasi keuangan daerah sebesar 29%. Sisanya sebesar 71% diterangkan oleh faktor-faktor lain diluar regresi. Berdasarkan output di atas juga diperoleh angka R sebesar 0,539. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara kinerja penyelenggaraan keuangan terhadap tertib administrasi keuangan daerah. Hubungan yang sedang ini disebabkan oleh kinerja penyelenggaraan keuangan cukup dominan untuk memperoleh tertib administrasi keuangan daerah yang baik, namun harus disertai dengan faktor lain agar diperoleh tertib administrasi keuangan daerah yang optimal.

b) Pengujian hipotesis alternatif (H_a) pertama diterima. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil dari thitung dengan ttabel. Dari tabel Coefficients di atas diperoleh nilai t hitung = 5,076. Sementara itu, untuk t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel = 1,991,999. Perbandingan antara keduanya menghasilkan: thitung > t tabel (5,076 > 1,999). Nilai signifikansi t untuk variabel X2 (kinerja penyelenggaraan keuangan) adalah 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0.05 (0,0(0,000 < 0,05)5). Sehingga dalam pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kinerja penyelenggaraan keuangan (X2) terhadap tertib administrasi keuangan daerah (Y) di Setda Kota Sukabumi.

c) Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: $Y=a+bX$

$$Y=33,700+0.438$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa dari setiap penambahan 1 unit variabel bebas kinerja penyelenggaraan keuangan akan meningkatkan nilai variabel terikat tertib administrasi keuangan daerah sebesar 0,438.

Pengaruh Kebijakan pengelolaan keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Keuangan Terhadap Tertib administrasi keuangan daerah

Dari hasil analisis di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Dari hasil analisis model summary, besarnya angka Koefisiensi Diterminasi (R^2) dalam perhitungan di atas ialah sebesar 0,349 atau sama dengan 34,9 %. Angka tersebut mempunyai arti bahwa, besarnya pengaruh X_1 (kebijakan pengelolaan keuangan) dan X_2 (kinerja penyelenggaraan keuangan) terhadap Y (tertib administrasi keuangan daerah) di Setda Kota Sukabumi adalah 34,9%, sedangkan sisanya yaitu 65,1%, harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi. Berdasarkan output diperoleh angka R sebesar 0,591. Maka dapat disimpulkan bahwa 59,1% terjadi hubungan yang sedang antara variabel X_1 (kebijakan pengelolaan keuangan) dan X_2 (kinerja penyelenggaraan keuangan) terhadap Y (tertib administrasi keuangan daerah) di Setda Kota Sukabumi. Sedangkan sisanya 40,9% dipengaruhi oleh variabel dari luar penelitian.

b) Dari hasil analisis anova (Uji F), nilai F sebesar 16,620 dengan signifikansi 0,000. Pengambilan keputusan pertama dengan melihat nilai F perbandingan F_{hitung} dan F_{tabel} dengan taraf signifikansi 5% dan $N=65$, diperoleh F_{tabel} adalah 3,11 dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha=5\%$, $df_1(k-1)$ atau $3-1=2$, dan $df_2(n-k)$ atau $85-3=82$ (n jumlah responden dan k adalah jumlah variabel). Dari tabel di atas diperoleh F_{hitung} sebesar 12,893. Hal ini menunjukkan $F_{hitung} (12,893) > F_{tabel} (3,14)$. Kedua, jika signifikansi $> \alpha(0,05)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak sedangkan apabila nilai signifikansi $< \alpha(0,05)$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X_1 (kebijakan pengelolaan keuangan) dan X_2 (kinerja penyelenggaraan keuangan) terhadap Y (tertib administrasi keuangan daerah) di Setda Kota Sukabumi.

c) Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2$$

$$Y=30,428+0,184X_1+0,322X_2$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

i. Nilai konstanta = 30,428. Hal ini menunjukkan apabila nilai X_1 (kebijakan pengelolaan keuangan) dan X_2 (kinerja penyelenggaraan keuangan) di obyek penelitian sama dengan nol, maka besarnya Y (tertib administrasi keuangan daerah) sebesar 30,428.

ii. Nilai koefisien $b_1=(0,184)$. Hal ini menunjukkan apabila nilai X_1 (kebijakan pengelolaan keuangan) mengalami kenaikan satu poin sementara X_2 (kinerja penyelenggaraan keuangan) tetap maka tertib administrasi keuangan daerah siswa meningkat sebesar 0,184.

Nilai koefisien $b_2 = 0,322$. Hal ini menunjukkan apabila nilai X_2 (kinerja penyelenggaraan keuangan) mengalami kenaikan satu poin sementara X_1 (kebijakan pengelolaan keuangan) tetap maka Y (tertib administrasi keuangan daerah siswa) meningkat sebesar 0,322.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh terhadap tertib administrasi keuangan daerah, yang ditunjukkan dari thitung > ttabel ($4,369 > 1,999$). Nilai signifikansi t untuk variabel kebijakan pengelolaan keuangan adalah 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0.05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dalam pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Dari tabel model Summary, nilai $R^2 = 0,482$, artinya variabel bebas kebijakan pengelolaan keuangan mampu menerangkan atau memprediksi nilai variabel terikat tertib administrasi keuangan daerah sebesar 48,2%. Hal ini berarti bahwa terjadi hubungan yang sedang antara kebijakan pengelolaan keuangan terhadap tertib administrasi keuangan daerah. Serta ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kebijakan pengelolaan keuangan (X_1) terhadap tertib administrasi keuangan daerah (Y) di Setda Kota Sukabumi. Kinerja penyelenggaraan keuangan mempunyai pengaruh terhadap tertib administrasi keuangan daerah, yang ditunjukkan dari thitung > ttabel ($5,076 > 1,999$). Nilai signifikansi t untuk variabel kinerja penyelenggaraan keuangan adalah 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0.05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dalam pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Dari tabel model Summary, nilai $R^2 = 0,539$, artinya variabel bebas kinerja penyelenggaraan keuangan mampu menerangkan atau memprediksi nilai variabel terikat tertib administrasi keuangan daerah sebesar 53,9%. Hal ini berarti bahwa terjadi hubungan yang sedang antara kinerja penyelenggaraan keuangan terhadap tertib administrasi keuangan daerah. Serta ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja penyelenggaraan keuangan (X_1) terhadap tertib administrasi keuangan daerah (Y) di Setda Kota Sukabumi. Kebijakan pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan keuangan secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap tertib administrasi keuangan daerah, yang ditunjukkan dari thitung > ttabel ($6,268 > 1,999$). Nilai signifikansi t untuk variabel kebijakan pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan keuangan adalah 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0.05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dalam pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Dari tabel model Summary, nilai $R^2 = 0,591$, artinya variabel bebas kebijakan pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan keuangan mampu menerangkan atau memprediksi nilai variabel terikat tertib administrasi keuangan daerah sebesar 59,1%. Hal ini berarti bahwa terjadi hubungan yang sedang antara kebijakan pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan keuangan terhadap tertib administrasi keuangan daerah. Serta ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kebijakan pengelolaan keuangan (X_1) dan kinerja penyelenggaraan keuangan (X_2) terhadap tertib administrasi keuangan daerah (Y) di Setda Kota Sukabumi.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah sebedai berikut: Dalam mengoptimalkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, hendaknya dapat dilaksanakan dengan komunikasi yang baik seperti adanya sosialisasi, koordinasi, musyawarah dan konsultasi tentang kebijakan pengelolaan keuangan, kemudian sumberdaya yang mumpuni seperti pengetahuan, pemahaman dan kemampuan untuk melaksanakan peraturan tersebut kemudian didukung dengan sikap dan Struktur birokrasi yang baik sehingga dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebaik mungkin, yang akhirnya implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan efektif dan efisien. Tertib tidaknya administrasi keuangan daerah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja penyelenggaraan keuangan daerah, jadi jika ingin administrasi keuangan daerah tersebut tertib dan baik maka implementasi keuangan daerah dan kinerja penyelenggaraan keuangan daerah tersebut perlu dioptimalkan dan dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisza, S., Alfi, F., & Nuraini, I. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 500-513.
- Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. *Iqtishaduna*, 80-91. <https://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64>
- Darma, N.D. A. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Kamasan, W., Raka, A.A. G., & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis AkruaL Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 39-46. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1272>
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah (Cetakan Pe)*. UB Press.
- Lucy Auditya. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. In *Indonesian Journal of Business and Management (Vol. 4, Issue 1, pp.87-96)*.
- Mbipi, S.D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152-158. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>
- Pareda, M., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 268-279. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18431>
- Raharja, M., Nur, R. P., & Wachid, A. (2015). *PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(2), 111-117.

- Rante, A., Mire, M.S., & Paminto, A. (2018). Analisis kemandirian keuangan daerah. *Inovasi*, 13(2), 92. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2461>
- Roni Ekha Putera. (2016). Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal. 18(3), 261-269.
- Ruspina, D. O. (2013). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi empiris pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, September, 1-27.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. No Title. ALFABETA.
- Sukabumi, P.W. (2007). Berita daerah kota sukabumi. 1950, 2-7.
- Sultan, M. (2014). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran. *Jurnal Academica Fisip Unrad*, 06(01), 1141-1148.
- Surjono, W., & Firdaus, N.R. (2019). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah Pemerintahan Berbasis Akrual dilakukan dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akrual dan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 1357-1368.